



PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahu anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Prop Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Unda Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
DAN
WALIKOTA BINJAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 395.022.996.823,00 bertambah sejumlah Rp. 20.284.664.940,47 sehingga menjadi Rp.415.307.661.763,47 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 390.322.996.823,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 9.897.273.696,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 400.220.270.519,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.395.022.996.823,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 20.284.664.940,47</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.415.307.661.763,47</u>
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		Rp (15.087.391.244,47)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 11.600,000,000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.487.391.244,47</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 22.087.391.244,47
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6,900,000,000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 100,000,000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 7,000,000,000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 15.087.391.244,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

P a s a l 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 13.609.485.199,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 236.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 13.845.485.199,00

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.362.127.655.624,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 362.127.655.624,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 14.585.856.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.661.273.696,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 24.247.129.696,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 6.168.580.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 6.468.580.000,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 4.508.420.199,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 96.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.604.420.199,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp. 160.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 40.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 200.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 2.772.485.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.572.485.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp. 57.336.136.624.00		
2) Bertambah	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. 57.336.136.624.00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp. 276.422.519.000.00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 276.422.519.000.00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp. 28.369.000.000.00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 28.369.000.000.00
4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp. 0.00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0.00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 0.00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp. 0.00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp. 13.941.600.000.00		
2) Bertambah	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 13.941.600.000.00
d. Dana Penyesuaian Otonomi Daerah			
1) Semula	Rp. 0.00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0.00		
Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lain		
1) Semula	Rp.	644.256.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.661.273.696,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Lain setelah Perubahan		Rp. 10.305.529.696,00

P a s a l 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	200.240.866.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(4.634.122.181,53)</u>
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 195.606.743.818,47
b. Belanja Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	194.782.130.823,00
2) Bertambah	Rp.	<u>24.918.787.122,00</u>
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 219.700.917.945,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	195.612.123.649,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(5.162.322.181,53)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 190.449.801.467,47
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.638.200.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 1.638.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	4.496.820.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(1.110.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 3.386.820.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 0.00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 0.00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	131.922.351,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 131.922.351,00
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	28.412.149.920,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.106.577.600,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai langsung setelah Perubahan			Rp. 30.518.727.520,00
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	100.073.834.565,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.222.420.070,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 109.296.254.635,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 66.296.146.338,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.589.789.452,00</u>	
3) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 79.885.935.790,00

P a s a l 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 11.600.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.487.391.244,47</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 22.087.391.244,47

b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 6.900.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 7.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 11.600.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.487.391.244,47</u>	
Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 22.087.391.244,47

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp. 0.00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan

Rp. 0.00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan

Rp. 0.00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan

Rp. 0.00

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Penyertaan modal pemerintah daerah setelah Perubahan

Rp. 0.00

c. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan

Rp. 0.00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0.00
3) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp. 0.00

P a s a l 5

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

P a s a l 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

P a s a l 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 September 2008

WALIKOTA BINJAI


H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai
Nomor 10 Tanggal 10 SEPTEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ALI SYAFRI, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010076650.